PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI WAHYU HANDAYANI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **866014**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.242.000.000

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/84 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/89 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 343 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
7. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 561.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED/MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 427.000.000

3. MOTOR, YAMAHA VIXON Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**8.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**407.019.694**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.218.019.694**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.218.019.694**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.